

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Oleh :

YULI DEWI SARTIKA

NIM. 07011381924159

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN
KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

**YULI DEWI SARTIKA
NIM. 07011381924159**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2023


Pembimbing

**Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP
NIP. 198701052015041003**



Mengetahui,

Ketua Jurusan



**Dr. M. Nur-Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Oleh :
Yuli Dewi Sartika
NIM. 07011381924159

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 25 Juli 2023

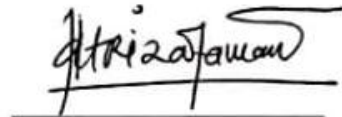
Pembimbing

Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP
NIP. 198701052015041003

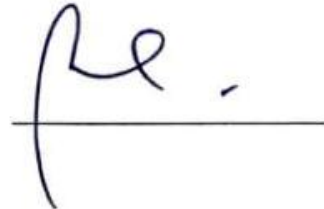


Penguji

1. Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 196810221997022001

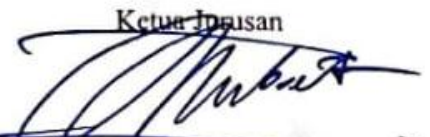


2. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009



Mengetahui,



Ketua Jurusan

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Dewi Sartika

NIM : 07011381924159

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Selatan ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 19 Juli 2023



Yuli Dewi Sartika
NIM. 07011381924159

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung”

(QS. Ali ‘Imran, 3 : 173)

“Setiap kebahagiaan dan kesuksesan ada doa ibu dibelakangnya”

Atas ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ibu dan Ayah (Alm)
2. Saudara Perempuan dan Keluarga Besar Saya
3. Kepada Tante dan Oom tersayang
4. Seluruh Dosen dan Staff FISIP Universitas Sriwijaya
5. Sahabat-sahabat Terbaik
6. Rekan Seperjuangan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik 2019
7. Almamater Kebanggaan, Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

This research was conducted to determine collaborative governance in the development of child-friendly cities. The increase in violence against children in South Sumatra Province has made the Government strive to protect children for the fulfillment of children's rights by developing child-friendly cities. The development of decent cities is a cross-sectoral issue which means that the responsibility for its implementation is not only carried by one party but many parties who will provide coordination, synchronization, and synergy with multi-stakeholders. The South Sumatra Provincial Government formed a KLA task force team to assist in the development of child-friendly cities. The establishment of KLA tasks makes stakeholders cooperate on these issues. The theory used in this study uses theories from Ansell & Gash (2007) with four dimensions, namely initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques of interviews, observation, and documentation. The results of this study reveal that collaborative governance in the development of child-friendly cities in South Sumatra Province is still not optimal. This is because there is still a lack of face-to-face dialogue, not yet the maximum role of leadership in facilitating dialogue, the absence of a special budget in collaboration and the absence of direct involvement from the community or institutions that help collaboration. Although the provisional results can lead South Sumatra Province to get the title of Decent Child Province (Provila).

Keywords: Collaborative Governance, Child Friendly City, Task Force KLA

Advisor



Dr. Sena Putra Prabujaya S.AP., M.AP
NIP. 198701052015041003

Indralaya, July 2023

**Head of Department Of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences Sriwijaya University**



Dr. M. Nur-Budiyanto, S.Sos.,MPA
NIP. 196911011994011001

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam pengembangan kota layak anak. Adanya peningkatan kekerasan pada anak di Provinsi Sumatera Selatan membuat Pemerintah berupaya untuk melakukan perlindungan anak atas pemenuhan hak anak dengan pengembangan kota layak anak. Pengembangan kota layak merupakan isu lintas sektoral yang artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh satu pihak tetapi banyak pihak yang nantinya memberikan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dengan multi-stakeholders. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembentukan tim gugus tugas KLA guna dapat membantu dalam pengembangan kota layak anak. Adanya pembentukan tugas KLA membuat para pemangku kepentingan melakukan kerjasama untuk permasalahan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Ansell & Gash (2007) dengan empat dimensi yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan kota layak anak di Provinsi Sumatera Selatan masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih jarang dialog tatap muka, belum maksimal peran kepemimpinan dalam memfasilitasi dialog, belum adanya anggaran khusus dalam kolaborasi dan belum adanya keterlibatan langsung dari masyarakat atau lembaga yang membantu kolaborasi. Meskipun hasil sementara dapat menghantarkan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan penghargaan predikat Provinsi Layak Anak (Provila).

Kata Kunci : Collaborative Governance, Kota Layak Anak, Gugus Tugas KLA

Pembimbing

Dr. Sena Putra Prabujaya S.AP., M.AP
NIP. 198701052015041003

Indralaya, Juli 2023

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunianya dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Selatan”. Shalawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa Penulis mengucapkan kepada orang tua yang sangat Penulis cintai Ibu Suli Rahayu dan Bapak Waryani (Alm) yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat tidak pernah putus dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan untuk mencapai derajat Pendidikan Strata Satu (S1) oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, petunjuk bantuan dan semangat. Oleh karena itu penulis dengan segala ketulusan hati mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN., ENG selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Bapak Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan ilmu dalam penyelesaian skripsi
6. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen FISIP Universitas Sriwijaya
8. Mba Ita Permata Sari selaku Admin Jurusan Administrasi Publik
9. Seluruh Pegawai dan Staff FISIP Universitas Sriwijaya
10. Seluruh Pegawai dan Staff Dinas-Dinas yang telah membantu memberikan informasi terkait penelitian
11. Saudara kandung Metty Rahmasari, Randi Riski Agustria (Kakak Ipar), dan Ceisya Amecca Zunaira (Ponakan Tersayang) yang selalu memberikan dukungan penuh secara moril dan materil serta mendoakan kelancaran
12. Tete Marni, Oom Tommy, dan Saudara persepupuan tersayang yang selalu memberikan dukungan baik secara moril dan materil dan selalu mendoakan
13. Sahabat seperjuangan Dhiya Alfiyah Tarizah, Hefsa Pebriani, Mila Enjelita, Riana Putri, Wira Rahmawati yang selalu setia menjadi sahabat dan telah menemani dan membantu dari awal perkuliahan hingga adanya skripsi ini
14. Teman-teman satu bimbingan skripsi Bapak Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP
15. Teman-teman satu angkatan dari Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2019

16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan semangat.

Dengan demikian semoga pihak yang telah membantu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Dalam pembuatan skripsi ini penulis sangat menyadari masih jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis berharap dapat diberikan kritikan dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menambah pengetahuan.

Indralaya, Juli 2023



Yuli Dewi Sartika
NIM. 07011381924159

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRACK	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori <i>Collaborative Governance</i>	10
2.1.2 Pengembangan Kota layak Anak.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Definisi Konseptual.....	32
3.3 Fokus Penelitian	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Informan Penelitian	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	37
3.7 Teknik Analisis Data	39

3.8 Jadwal Penulisan	42
3.9 Sistematika Penulisan	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.2 Informan Penelitian	56
4.3 Hasil Penelitian.....	58
4.3.1 Kondisi Awal	58
4.3.2 Desain Kelembagaan	67
4.3.3 Kepemimpinan Fasilitatif	70
4.3.4 Proses Kolaboratif.....	73
4.4 Pembahasan	87
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Kekerasan Anak di Provinsi Sumatera Selatan	2
Gambar 2 Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA)	5
Gambar 3 Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell & Gash (2007)	13
Gambar 4 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 5 Komponen Analisis Data	40
Gambar 6 Peta Geografis Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	47
Gambar 7 Isi Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 249/KPTS/DPPPA/2023	71
Gambar 8 Isi Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 249/KPTS/DPPPA/2023	71
Gambar 9 Rapat Perkembangan SK Peraturan Gubernur	74
Gambar 10 Kerangka Model <i>Collaborative Governance</i>	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	1
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3 Fokus Penelitian	34
Tabel 4 Informan Peneltian	37
Tabel 5 Jadwal Penulisan	42
Tabel 6 Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Selatan	45
Tabel 7 Jumlah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan	46
Tabel 8 Informan Penelitian	56
Tabel 9 Matriks Hasil Penelitian	85

DAFTAR SINGKATAN

DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KLA	: Kota Layak Anak
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan perlindungan terhadap anak menjadi salah satu isu utama yang sering diperbincangkan di Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini permasalahan yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan semakin marak terjadi. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak. Sumatera Selatan yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia mengalami peningkatan kekerasan terhadap anak. Dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 250 anak terdiri dari 102 anak laki- laki dan 148 anak perempuan. Korban kekerasan tersebut terdiri 17 kabupaten/kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1 Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

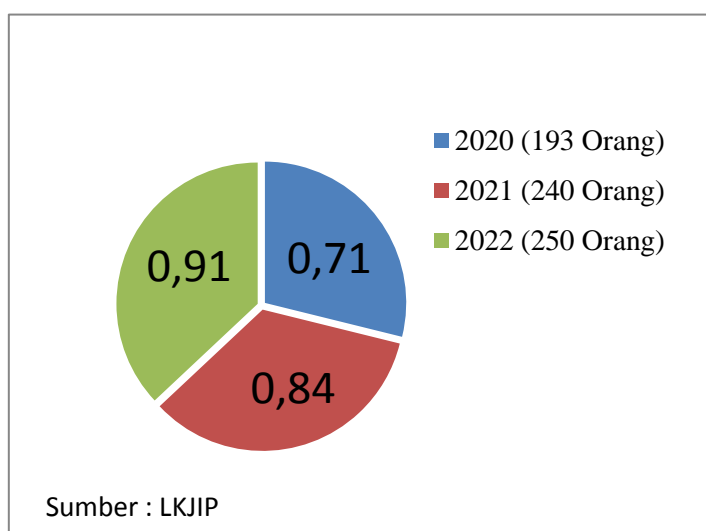
No	Kota/Kabupaten	Jumlah Kasus	Jumlah Korban Anak	
			L	P
1	Kab. Banyu Asin	15	5	10
2	Kab. Empat Lawang	0	0	0
3	Kota Lubuklinggau	0	0	0
4	Kota Pagaralam	16	7	9
5	Kota Palembang	12	5	7
6	Kota Prabumulih	36	24	12
7	Kab. Lahat	15	4	11
8	Kab. Muara Enim	48	22	26
9	Kab. Musi Banyuasin	7	1	6
10	Kab. Musi Rawas	32	9	23
11	Kab. Musi Rawas Utara	1	0	1
12	Kab. Ogan Ilir	3	1	2

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Kasus	Jumlah Korban Anak	
			L	P
13	Kab. Ogan Komering Ilir	19	7	12
14	Kab. Ogan Komering Ulu	29	13	16
15	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	0	1
16	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	5	1	4
17	Kab. Pali	11	3	8
Total Sumatera Selatan		250	102	148

Sumber : Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (SIMFONI) bulan Desember 2022 yang diolah oleh Bidang Data Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah anak korban kekerasan pada tahun 2021 sebanyak 250 orang atau capaian rasio sebesar 0,91 (Per 10.000 anak). Capaian rasio anak korban kekerasan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 193 orang dengan rasio 0,71 (per 10.000 anak), tahun 2020 sebanyak 240 orang dengan rasio 0,84 (per 10.000 anak).

Gambar 1 Data Kekerasan Anak di Provinsi Sumatera Selatan



Peningkatan kekerasan terhadap anak disebabkan selama Pandemi Covid-19. Mayoritas tindak kekerasan terhadap anak terjadi pada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Perubahan kondisi finansial keluarga akibat pandemi Covid-19 akan semakin memperburuk tekanan psikologi pada keluarga yang dapat berdampak fatal pada anak. Anak menjadi korban ledakan emosi ledakan orang tua sebagai pihak terdekat dan kecil kemungkinannya melakukan perlawanan.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Anak merupakan investasi sumber daya manusia yang nantinya sebagai tongkat estafet penerus masa depan yang memiliki potensi dan peranan strategis (Peraturan Pemerintah RI, 2002). Tetapi dengan adanya kekerasan yang terjadi pada anak dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Anak tumbuh kembang dengan rasa takut dan menyalahkan keadaan sehingga menghambat tumbuh kembang anak secara optimal. Diharapkan bertumbuh dengan kembang baik pasti memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.

Negara juga memiliki komitmen untuk menjamin upaya perlindungan anak diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 yang menyebutkan “Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak merupakan tanggung jawab untuk di didik menjadi insan berkualitas dan dipenuhi hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal serta terlindungi. Memenuhi hak- hak anak pemerintah berupaya melakukan kebijakan dengan kebijakan membangun Kota/Kabupaten Layak Anak.

Kota layak anak merupakan sebuah kebijakan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimulai tahun 2006 melalui program kota layak anak. Kebijakan tersebut diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) yang menjelaskan bahwa (Kementerian PP-PA RI, 2011):

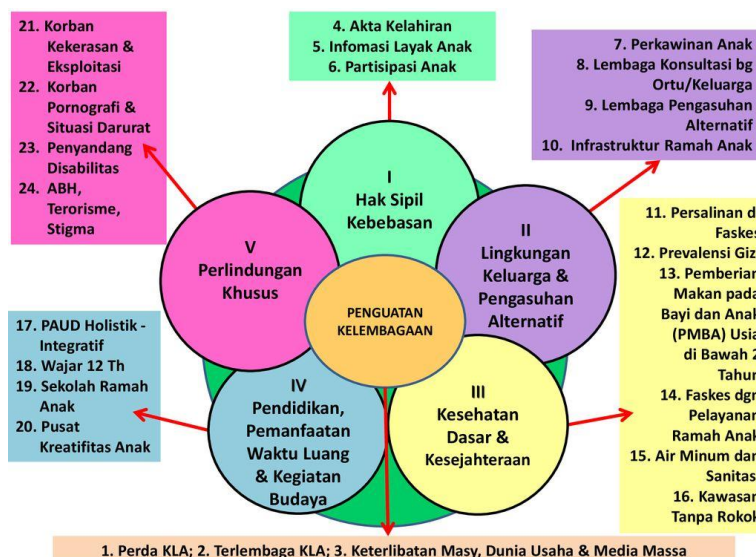
“Kota/Kabupaten Layak Anak merupakan proses pembangunan mendasari dari hak anak melalui penggabungan komitmen dan sumber daya pemerintah serta masyarakat yang sistematis dan berkelanjutan dalam menjamin terpenuhinya hak anak melalui kebijakan atau program”.

Selanjutnya Kebijakan pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 21 ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

1. Ayat 4 : Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah
2. Ayat 5 : Kebijakan yang dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kota/Kabupaten Layak Anak. (Peraturan Pemerintah RI, 2014)

Kota layak anak (KLA) adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Kebijakan kota layak anak memiliki indikator keberhasilan dalam kebijakan dan indikator tersebut terdiri dari penguatan kelembagaan dan 6 kluster yang dijadikan penentuan keberhasilan dari kebijakan kota layak anak. Enam kluster terdiri dari kluster 1 hak sipil dan kebebasan, kluster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster 4 pendidikan,

pemanfaatan, waktu luang dan kegiatan budaya, kluster 5 perlindungan khusus, dan kluster 6 penguatan kelembagaan (Duadji & Tresiana, 2018).



Gambar 2 Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA)

Salah satu indikator pelaksanaan dalam upaya hak anak melalui pengembangan Kota Layak Anak yaitu dilihat dari penguatan kelembagaan yang terdiri dari Peraturan Daerah Kota Layak Anak, Lembaga Kota Layak Anak, dan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak membantu keberhasilan dari komitmen pemerintah dalam pengembangan kota layak anak. Komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak anak yang diwujudkan dalam pengembangan kota layak anak ini tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga harus melaksanakan kebijakan ini.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan Kota Layak Anak untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak. Komitmen pemerintah dapat

berguna mengantisipasi kegagalan potensi-potensi yang dapat mengganggu proses pengembangan Kota Layak Anak.

Pengembangan Kota Layak Anak, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu merubah pola memerintah (*governance*) dengan melakukan penguatan melalui kerjasama, pengembangan model proses komunikasi dan tindakan bersama dengan kelembagaan lain. Proses pada perencanaan dan merumuskan kebijakan pemerintah tidak dapat melakukan sendiri, pemerintah harus melibatkan *multi-stakeholders* (pemangku kepentingan) lainnya. *Multi-stakeholders* yang dilibatkan dalam tata kelola pemerintahan untuk mengambil keputusan publik disebut *collaborative governance*.

Menurut Ansell dan Gash (2007) istilah *Collaborative governance* yaitu merujuk pada adanya komunikasi dan tindakan bersama dengan para pemangku kepentingan (*multi-stakeholders*), dimana para pemangku kepentingan duduk bersama untuk mengambil suatu keputusan publik yang merupakan hasil konsensus melalui suatu proses dialog warga secara tatap muka. Proses tatap muka tidak hanya dibagian tahapan proses tetapi keseluruhan dari tahapan proses kolaborasi. Selanjutnya Ansell dan Gash (2007) memperkuat bahwa konsep membangun, termasuk merumuskan kebijakan pembangunan Kota Layak Anak melalui proses kolaboratif adalah suatu proses *adaptive system*, dimana pendapat-pendapat yang berbeda dari berbagai pihak yang akhirnya menghasilkan suatu konsensus.

Dalam penulisan ini menggunakan model menurut Ansell dan Gash, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2007). Proses kolaboratif menurut model ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu dimulai dari adanya dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun

kepercayaan (*trust building*), membangun komitmen (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan yang terakhir bentuknya hasil sementara (*intermediate outcome*) (Duadji & Tresiana, 2018)

Berdasarkan penulisan terdahulu dari Mafaza & Setyowati (2020) dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Kementul Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang” menjelaskan bahwa hasil penelitian yaitu kolaborasi masih belum terlaksana secara maksimal. Kendala belum terlaksana secara maksimal disebabkan kurangnya kejelasan aturan, pemahaman bersama dan komitmen para stakeholders (Mafaza & Setyowati, 2020) . Relevan dengan hasil penulisan Anggraini & Mashur (2022) dengan judul penulisan “*Collaborative Governance* Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” menjelaskan *Collaborative Governance* belum terlaksana secara optimal dikarenakan belum terlaksana secara berkala kerjasama dan perlu adanya kesepakatan secara optimal seperti kesepakatan MOU (Anggraini & Mashur, 2022). Selanjutnya hasil penulisan dari Hidayatulloh & Hutami (2019) yang menyatakan kelola kolaboratif dalam pengarusutamaan gender masih sangat terbatas dan kendalanya yaitu pada proses pembuatan kebijakan belum menunjukkan hubungan majerial antar pemangku kebijakan (Hidayatulloh & Hutami, 2019)

Penelitian terdahulu diatas menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* masih belum terlaksana secara optimal. Maka dari itu dilihat dari permasalahan sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penulisan mengenai *Collaborative Governance* dan dalam peningkatan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan perlu pengembangan Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Selatan. Pengembangan kota layak anak merupakan *cross cutting issue* atau isu lintas sektoral, maka artinya

tanggungjawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh satu pihak tetapi banyak pihak yang nantinya memberikan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dengan *multi-stakeholders*. Perlu adanya penguatan kelembagaan dengan konsep *collaborative governance* dimana memiliki keterkaitan erat dengan aktor gugus tugas KLA. Mengingat banyak aktor yang dilibatkan dalam pengembangan KLA serta untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan dibutuhkan arah yang jelas dibutuhkan konsep *collaborative governance*. Dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada bagian proses kerjasama kolaborasi dalam gugus tugas KLA. Dalam langkah-langkah penyelenggaraan pengembangan KLA tidak akan berjalan baik jika tidak ada penguatan kelembagaan yang dilakukan pada tahapan awal perencanaan yakni pembentukan gugus tugas KLA. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan penulisan dengan judul “*Collaborative Governace* Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengembangan kota layak anak di Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan yaitu : Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis *Collaborative Governance* dalam pengembangan kota layak anak di Provinsi Sumatera Selatan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini yaitu memberikan kontribusi literatur serta menjadi referensi penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengembangan kota layak anak.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini, memberikan masukan dan saran kepada stakeholders terkait pengembangan Kota Layak Anak di Provinsi dalam perspektif *Collaborative Governance* di Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. W., & Mashur, D. (2022). Collaborative governance dinas sosial provinsi Riau dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 1. <https://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/56%0Ahttps://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/download/56/41>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative governance in theory and practice*. 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Cika Pratiwi, D., & Kriswibowo, A. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Surabaya. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7, 192–204.
- Cosmas, Sangkala, & Hasniati. (2021). Analisis kinerja pegawai ditinjau dari pelatihan dan pendidikan dan pemberian insentif. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 12(2), 45–54.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). Kota layak anak berbasis collaborative governance. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201>
- Fisher, J., Stutzman, H., Vedoveto, M., Delgado, D., Rivero, R., Quertehuari Dariquebe, W., Seclén Contreras, L., Souto, T., Harden, A., & Rhee, S. (2020). Collaborative governance and conflict management: lessons learned and good practices from a case study in the Amazon Basin. *Society and Natural Resources*, 33(4), 538–553. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1620389>
- Hidayahtulloh, M. A., & Hutami, A. N. (2019). Collaborative governance in gender mainstreaming policy in Yogyakarta city. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 10(2), 166–182. <https://doi.org/10.18196/jgp.102103>
- Huang, I. Y. F. (2020). Fighting COVID-19 through government initiatives and collaborative governance: the Taiwan experience. *Public Administration Review*, 80(4), 665–670. <https://doi.org/10.1111/puar.13239>
- Jannah, M., Kariem, M. Q., Mandiri, I. G., Mandiri, I. G., Indo, U., & Mandiri, G. (2022). *Optimalisasi peran forum anak dalam memsosialisasikan kebijakan kota layak anak di kota Palembang*. 10, 65–76.
- Kementerian PP-PA RI. (2011). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak*.
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative governance dalam pengembangan

- desa wisata kemetul kecamatan Susukan kabupaten Semarang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>
- Makhfudz. (2021). Desain dan peran collaborative governance penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Surabaya. *Cakrawala*, 15(1), 11–23. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.372>
- Maulana, M. I., Sawitri, ;, Utami, B., & Karlina, ; Nina. (2022). Collaborative governance dalam pembangunan kawasan perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Journal.Uir.Ac.Id*, 13, 276–290. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824>
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). Good governance dalam pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10–16. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>
- Ode, L., Islamy, S., & Andriani, D. R. (2022). Proses collaborative governance dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1).
- Peraturan Pemerintah RI. (2002). Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. In *Arsyad, Azhar*, (Issue 190211614895, p. 2002).
- Peraturan Pemerintah RI. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. In *UU Perlindungan Anak* (p. 48). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Prabowo, A., Muluk, M. R. K., & Hayat, A. (2021). Model collaborative governance dalam pembangunan desa Pada masa pandemi covid-19. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 15–31.
- Prihatin, E., & Dwimawanti, I. H. (2020). Collaborative governance dalam mengatasi kenakalan remaja di kabupaten tegal. *E-Journal of Public Policy and Management Review*, 3, 1–17.
- Rahmawati, A. (2016). Kolaborasi antar daerah dalam penyelesaian konflik antar nelayan di perairan Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul. *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–17. <http://journal.stia-an.ac.id/index.php/PRDM/article/view/68>
- Sakti, A. F. T., & Nur, M. I. (2022). Penguatan perlindungan anak kota Bandung dalam perspektif collaborative governance. *MINISTRATE*, 4(1), 83–102.
- Stoker, G. (2018). Governance as theory: five propositions. *International Social Science Journal*, 68(227–228), 15–24. <https://doi.org/10.1111/issj.12189>
- Tongkotow, N. F., Waworundeng, W., & Kimbal, A. (2021). Collaborative goverannace dalam pengelolaan wisata pantai lakban di kecamtan Ratatotok.

Jurnal Governance, 1(1), 1–11.

- Ulfa, L. M. (2018). Collaborative governance dalam penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) taman kota di Surabaya. *Doctoral Dissertation*, 1(1), 1–14.
- Watimena, M. A. (2020). Implementasi good corporate governance, good governance dan kepemimpinan situasional terhadap kinerja pegawai. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 1(2), 195–214. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i2.p195-214>
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative governance dalam kebijakan pembangunan pariwisata di kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>
- Zaputri, A. R., Rahardjo, K., & Utami, H. N. (2013). Pengaruh insentif material dan non material terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan (studi pada karyawan produksi cetak PT. temprina media grafika di Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1–8.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). The type of descriptive research in communication study. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83–90.